

Peran Dinas Sosial DIY dalam Memperbaiki Kesejahteraan Manusia Silver di Yogyakarta

A.Indri Wahyuni¹, Syamraeni², Novinta Sari³, Andira Nurqalbi⁴, Ahmad Thoriq Akhsan Ramdhani⁵
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

*e-mail: andiindriwahyuni@gmail.com¹, syamraenishamra1493@gmail.com², novintasari180@gmail.com³,
andiranurqalbi20@gmail.com⁴, ahmadthoriqakhsanramdhani@gmail.com⁵

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
24.07.2025	13.08.2025	29.08.2025	14.09.2025

Abstract: The presence of "human silver" at many red light intersections in Yogyakarta is a social phenomenon that indicates the inequality of social and economic welfare. In this case, the Social Service as a government agency has a role and responsibility in improving the welfare of the community. This is in accordance with Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare. The purpose of this study is to determine and describe the Social Service of the Special Region of Yogyakarta in improving the welfare of "human silver" in Yogyakarta. This study is a field study using descriptive qualitative methods. Data collection techniques used are interviews and observations. The results of this study indicate that economic factors, such as increasing basic needs and limited employment opportunities, as well as family factors, are the main drivers of someone choosing to become a human silver and efforts made by the Social Service of the Special Region of Yogyakarta in accordance with Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, namely through assessment camp activities where human silver receives social rehabilitation, social security, social empowerment, and social protection. Numerical data related to the control and assessment program are also presented to provide a quantitative picture. In-depth analysis reveals that while the Social Services Agency's programs are in line with the legal framework, their effectiveness remains hampered by several key factors. These include significant disparities in the earning potential of street bums compared to formal employment alternatives, high individual mobility that complicates tracking and ongoing intervention, and policy implementation challenges such as the lack of clear technical regulations and the community's role in perpetuating this phenomenon through cash handouts. The Yogyakarta Social Services Agency's efforts in addressing street bums are in line with the legal mandate, but achieving sustainable welfare improvements requires a holistic approach that focuses not only on individual rehabilitation but also addresses the root causes of economic problems and the complex challenges of policy implementation.

Keywords: Silver People, Welfare, Department of Social Affairs

Abstrak: Keberadaan manusia silver di banyak titik persimpangan lampu merah Yogyakarta merupakan salah satu bentuk fenomena sosial yang menandakan adanya ketimpangan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Dinas Sosial DIY dalam memperbaiki kesejahteraan manusia silver di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa faktor ekonomi, seperti kebutuhan dasar yang meningkat dan keterbatasan lapangan kerja, serta faktor keluarga, menjadi pendorong utama seseorang memilih menjadi manusia silver dan upaya yang dilakukan Dinas Sosial DIY sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu melalui kegiatan assesment camp dimana manusia silver mendapat rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Data numerik terkait penertiban dan asesmen program juga disajikan untuk memberikan gambaran kuantitatif. Analisis mendalam mengungkapkan bahwa meskipun program-program Dinas Sosial telah sejalan dengan kerangka hukum, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa faktor kunci. Ini termasuk disparitas signifikan dalam potensi pendapatan manusia silver di jalanan dibandingkan dengan alternatif pekerjaan formal, tingginya mobilitas individu yang menyulitkan pelacakan dan intervensi berkelanjutan, serta tantangan implementasi kebijakan seperti kurangnya aturan teknis yang jelas dan peran masyarakat dalam memperpetuasi fenomena ini melalui pemberian uang. Upaya Dinas Sosial DIY dalam penanganan manusia silver telah sesuai dengan mandat hukum, namun untuk mencapai peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada rehabilitasi individu tetapi juga mengatasi akar masalah ekonomi dan tantangan implementasi kebijakan yang kompleks.

Kata kunci: Manusia Silver, Kesejahteraan, Dinas Sosial, Efektivitas program, Implementasi Kebijakan

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan proses pembangunan sosial dan ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas kehidupan penduduk. Kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya sebatas aspek peningkatan pendapatan atau jumlah aset yang dimiliki penduduk. Namun, kesejahteraan yang dimaksud yakni berkaitan dengan segala aspek seperti pemerataan pendapatan, kemudahan dalam mengakses pasar tenaga kerja, kemudahan dalam mengakses sarana pendidikan, layanan kesehatan, kebebasan individu untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan lainnya (BPS DIY, 2020). Hal ini tidak berbanding lurus dengan realita yang terjadi di tengah masyarakat yakni munculnya beberapa fenomena sosial.

Fenomena sosial merupakan bentuk dari semua perilaku yang dipengaruhi dan mempengaruhi apa yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok tertentu terhadap individu atau kelompok lainnya. Fenomena sosial dapat diartikan sebagai kejadian yang dapat dipelajari dalam kehidupan masyarakat (Suharto, 2015). Dalam hal ini fenomena sosial dapat dijelaskan sebagai peristiwa yang terjadi dan dapat dipelajari dalam kehidupan sosial salah satunya fenomena manusia silver.

Manusia silver atau manusia perak merupakan orang-orang yang mengecat sekujur tubuhnya dengan warna perak untuk mencari perhatian dengan meminta-minta ataupun mengamen. Keberadaan mereka dapat dijumpai di pinggir jalan atau tempat-tempat umum lainnya. Menilik lebih jauh, keberadaan manusia silver sebenarnya sudah ada jauh sebelum tahun 2000 yang saat itu diekspresikan sebagai sebuah seni (Alfikri, 2021). Kemudian, mulai tersebar di beberapa kota-kota besar di Indonesia pada tahun 2020 seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung, hingga Yogyakarta dengan tujuan yang berbeda. Perbedaan keberadaan manusia silver saat ini, merupakan dampak dari kondisi ekonomi yang menjadi masalah sosial sehingga memunculkan suatu fenomena perilaku manusia yang dalam kehidupannya bekerja melakukan perubahan secara disengaja (Darmawan, 2013). Melihat fenomena ini, tentu sangat memprihatinkan karena berkaitan pula dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menarik diperhatikan karena biasanya untuk melihat manusia silver, kita harus menonton dalam sebuah panggung pertunjukan seni atau pada acara-acara tertentu. Namun saat ini kita dapat mudah menemukan manusia silver yang ada di persimpangan jalan.

Sebelum pandemi Covid-19 keberadaan manusia silver sudah menjadi sebuah masalah sosial yang patut diperhatikan seperti di beberapa kota besar manusia silver menjadi salah satu penyebab kemacetan dan mengganggu ketertiban umum (Arifin, 2023). Pada saat pandemi Covid-19 keberadaan manusia silver mengalami sejumlah peningkatan yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya banyaknya PHK dan sulitnya lowongan pekerjaan sehingga menambah jumlah pengangguran. Akibatnya ekonomi ambruk, kemiskinan, kesenjangan sosial pun semakin terang dan nyata (Rosyadi, 2021). Hal ini berpengaruh pada cara beberapa masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga salah satunya menjadi silverman yang mana dianggap lebih mudah tanpa perlu mengeluarkan effort dan modal yang besar.

Dalam hal ini Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan perorangan, kelompok, dan masyarakat (DINSOS, 2023). Dinas Sosial ada dalam rangka menjaga kestabilan kesejahteraan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (pkh.kemensos.go.id). Fenomena manusia silver di Yogyakarta harus segera ditangani oleh pemerintah daerah dengan cara merealisasikan Undang-undang Nomor 11 tahun 2009.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Konsep dari pemberdayaan sosial ini yaitu pembangunan ekonomi yang mencakup tiga aspek diantaranya menciptakan potensi masyarakat dapat berkembang, penguatan potensi melalui langkah nyata, dan melindungi serta membela kepentingan masyarakat lemah (Noor, 2011). Kemudian perlindungan sosial adalah semua

upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial merujuk kepada proses, kebijakan dan intervensi yang sebagian besar dikembangkan oleh pemerintah guna merespon resiko ekonomi, politik dan keamanan yang dihadapi oleh penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan (Suharto, 2015). Kemudian Dinas Sosial memiliki peranan penting pula dalam mengedukasi dan pemulihan psikologi manusia silver yang telah mengubah pola pikir mereka sehingga lebih memilih berdiri dipersimpangan jalan setiap hari tanpa memperdulikan kesehatan mereka. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga mencerminkan masalah kesejahteraan yang mendalam. Oleh hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Dinas Sosial DIY dalam memperbaiki kesejahteraan manusia silver di Yogyakarta, serta menganalisis efektivitas program yang telah dilaksanakan dan tantangan-tantangan dalam implementasi kebijakan penanganan fenomena ini.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif dimana peneliti ikut serta berpartisipasi di lapangan dengan mencatat segala hal yang terjadi dan melakukan analisis rekletif terhadap berbagai dokumen di lapangan serta membuat hasil penelitian secara mendetail (Sugiyono, 2011). Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mendapatkan data yang akurat dan memenuhi standar yang ditetapkan. Objek pada penelitian ini adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan terhadap manusia silver di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian tanpa adanya perantara. Adapun metode yang digunakan dalam memperoleh data primer yakni dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan tatap muka dengan informan yaitu manusia silver dan pegawai Dinas Sosial DIY. Sedangkan observasi dilakukan dengan datang langsung ke lokasi persimpangan lampu merah Janti dan Maguwoharjo serta kantor Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik ini bisa dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2018). Kemudian analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi menjadi sebuah fenomena yang memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah (Tanzeh, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Dinas Sosial DIY dalam meningkatkan kesejahteraan manusia silver di Yogyakarta, serta menganalisis efektivitas program yang telah dilaksanakan dan tantangan-tantangan dalam implementasi kebijakan penanganan fenomena ini. Selama proses penulisan naskah ini, peneliti melakukan tahapan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia Silver di Yogyakarta

Manusia silver adalah orang yang melumuri tubuhnya dengan cat berwarna silver untuk mengamen atau mengemis. Selain itu manusia silver dapat diartikan pengamen yang rela tubuhnya di cat semprot berwarna perak yang mengkilat, untuk menarik perhatian orang-orang disekitarnya (Hartati dalam Alfikri, 2021).

Manusia Silver sebelumnya sudah ada di Yogyakarta pada area Malioboro dalam melakukan aksi-aksinya sebagai bentuk seni pertunjukan. Namun, setelah adanya pandemi COVID-19 keberadaan manusia silver ini meningkat tajam yang melakukan aktivitasnya di persimpangan lampu merah kota Yogyakarta. Fenomena manusia silver di persimpangan lampu merah Yogyakarta adalah perilaku mengandalkan kesenian, yaitu mengecat seluruh tubuh dengan warna silver. Hal tersebut dilakukan dengan niat untuk menghibur orang lain guna mendapat imbalan atasnya (Saputra, 2022).

Saat ini, jumlah pasti individu yang bekerja sebagai "manusia silver" di Yogyakarta masih belum dapat dipastikan. Kesulitan dalam pendataan mereka disebabkan oleh beberapa faktor kunci. Pertama, tingginya mobilitas mereka membuat pelacakan yang konsisten menjadi sangat menantang karena mereka sering berpindah lokasi, sehingga sulit untuk menetapkan keberadaan mereka secara akurat pada waktu tertentu. Kedua, jumlah mereka sangat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi, dengan individu yang terlihat hari ini mungkin tidak ada besok, dan lokasi mereka dapat berubah dengan cepat dari satu area ke area lain dalam waktu singkat. Dinamika ini menjadi hambatan signifikan bagi setiap upaya perhitungan yang tepat (Rusydi, 2023).

Penelitian ini dirancang untuk mengkaji kondisi kesejahteraan "manusia silver" di Yogyakarta, tidak hanya selama puncak pandemi COVID-19. Penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana kondisi kesejahteraan manusia silver di Yogyakarta saat pandemi Covid-19, tetapi juga sesudah pandemi Covid-19. Dari hasil analisis penelitian terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang masih memilih menjadi manusia silver meskipun pandemi Covid-19 perlahan usai penelitian ini diambil berdasarkan wawancara di persimpangan lampu merah area Maguwoharjo, dan Janti terhadap beberapa responden manusia silver. Hasil wawancara peneliti menganalisa berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang memilih menjadi manusia silver:

1. Kebutuhan Ekonomi

Menurut Gilarso, kebutuhan hidup adalah suatu kebutuhan yang paling tidak harus terpenuhi agar hidup menjadi layak. Kebutuhan timbul dari adanya suatu dorongan pada diri manusia dan juga kenyataan jika manusia memerlukan sesuatu untuk mempertahankan hidupnya. Kebutuhan pokok yang wajib terpenuhi bagi masyarakat atau keluarga miskin, yaitu: kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan (Gilarso, 2002).

Kebutuhan pangan seseorang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang harus terpenuhi, menurut Andri (28 tahun) alasan ia memilih menjadi manusia silver karena tuntutan ekonomi dimana kebutuhan pokok terus meningkat sehingga mau tidak mau memilih menjadi manusia silver.

2. Terbatasnya Lowongan Pekerjaan

Pada dasarnya manusia silver ini merupakan orang-orang yang terkena PHK, kehilangan pekerjaan dan lain-lain yang mana kebanyakan mereka orang baru di dunia jalanan (wawancara Bu Desi, pegawai DINSOS DIY). Kemudian hal ini dikonfirmasi oleh salah seorang manusia silver yang berhasil penulis wawancarai. Ia bernama Adi (30 tahun) yang menjadi manusia silver sekitar setengah tahun yang lalu dengan alasan korban karyawan PHK dari proyek yang ada di Tangerang. Ia di PHK saat adanya pandemi dan sejak saat itu ia sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketika ia berada di Jogja ia bertemu teman dan ditawarkan untuk menjadi manusia silver. Ia memilih pekerjaan ini dengan alasan untuk sebatas memenuhi kebutuhan hidup dan tidak merugikan orang lain.

3. Keluarga

Menurut Notoatmojo (2005) faktor yang berperan dalam pembentukan perilaku dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, yang pertama faktor internal, faktor yang berada dalam diri individu itu sendiri yaitu berupa kecerdasan, persepsi, motivasi, minat, emosi, dan sebagainya untuk mengolah pengaruh-pengaruh dari luar. Penelitian ini melihat lingkungan internal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Seperti yang diungkapkan seorang manusia silver yang mengatakan, ia menjadi manusia silver berawal dari orang tua yang berpisah sehingga. Dari sini lah bersekolah tidak lagi menjadi tujuan dan akhirnya ketika dewasa lebih memilih menjadi seorang manusia silver.

Dari faktor-faktor di atas diketahui bahwa sejatinya manusia silver menginginkan pekerjaan yang lebih layak. Karena manusia silver pun merupakan bagian dari masyarakat yang memimpikan kehidupan yang sejahtera. Ketika masyarakat sejahtera tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang berimplikasi terhadap peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan menyebutkan kesejahteraan sosial merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial

masyarakat untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa menjadi seorang manusia silver setidaknya ia dapat menghasilkan Rp 80.000 sampai Rp 100.000/hari dan masih dipotong iuran kelompok dalam satu wilayah dan lain-lain, maka penghasilan bersih yang didapat sekitar Rp.50.000 dalam sehari. Menurut mereka penghasilan tersebut masih bisa mencukupi namun sangat pas-pasan. Seperti yang disampaikan ibu agus seorang manusia silver terkait pertanyaan apakah penghasilan menjadi silverman menjanjikan “yah lumayan, ngumpulin sedikit demi sedikit soalnya ninggal anak juga 2 tahun.” Hal inilah yang menjadikan mereka masih tetap menjadi seorang manusia silver.

Namun, data dari sumber lain menunjukkan potensi penghasilan yang jauh lebih tinggi. Beberapa laporan menyebutkan pendapatan harian manusia silver bisa berkisar antara Rp 80.000 hingga Rp 300.000. Bahkan, Satpol PP Kota Yogyakarta melaporkan bahwa penghasilan manusia silver bisa mencapai Rp 600.000 sehari, yang jika dikalikan sebulan bisa mencapai Rp 18 juta. Perbedaan data penghasilan yang signifikan ini mengindikasikan variasi yang luas dalam pendapatan, kemungkinan dipengaruhi oleh lokasi, durasi aktivitas, dan faktor lainnya. Potensi penghasilan yang tinggi ini, meskipun mungkin tidak konsisten atau universal bagi semua, menciptakan insentif ekonomi yang sangat kuat, yang menjadi daya tarik bagi individu untuk tetap memilih profesi ini.

Manusia silver jika melakukan aktivitasnya di jalanan, maka Dinsos menggunakan PERDA Nomor 1 tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis dimana dikatakan bahwa aktivitas mengemis adalah aktivitas meminta-minta dengan alat ataupun tidak dengan alat. Artinya ketika ada manusia silver di tempat umum/pinggir jalan yang mereka melakukan aktivitas meminta-minta kepada pengguna jalan, maka ia dapat dikategorikan mengemis. Sehingga, menurut PERDA pergelandangan dan pengemis itu sama dengan dilarang. Kemudian melihat dari segi ketertiban umum, jika memanfaatkan jalan untuk aktivitas ekonomi apalagi meminta-minta itu merupakan hal yang tidak dibenarkan.

Camp assesment

Kegiatan penertiban dilakukan oleh Pol PP untuk menegakkan PERDA nomor 1 tahun 2014 dimana para pengemis dan gelandangan termasuk manusia silver, dirazia yang kemudian dilakukan assesmen. Tugas dari Dinas Sosial adalah menerima orang-orang yang terjaring dalam Razia untuk dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi yang dilakukan adalah rehabilitasi tahap awal yang dilakukan di *camp assesment* berkaitan dengan alasan mereka di jalanan, apakah mereka tahu tentang PERDA pergelandangan dan pengemis dan lain sebagainya. Kegiatan *camp assesment* ini dilakukan minimal satu bulan dan maksimal tiga bulan. Hal ini tercantum dalam PERGUB nomor 36 tahun 2017 yang tercantum SOP penanganan manusia gelandangan.

Orang-orang yang berada di *camp assesment* diberikan pembinaan yang melibatkan beberapa unsur, mulai dari keagamaan, TNI-POLRI, tokoh masyarakat, dan wirausaha. Selain itu, Dinas Sosial DIY juga menyediakan fasilitas yang ada di *camp assesment* yakni adanya psikolog, dokter dan pendamping sosial. Pada saat rehabilitasi ini, Dinas Sosial berperan pula dalam memberikan alternatif berkaitan dengan hal apa yang dapat dilakukan orang-orang tersebut selain menjadi manusia gelandangan di jalan. Misalnya memberikan pelatihan-pelatihan untuk memberikan keahlian kepada mereka seperti membuat sempol, membuat masker, dan lain-lain. Yang paling penting adalah mengedukasi mereka tentang adanya PERDA bahwa kegiatan yang mereka lakukan di jalanan merupakan hal yang dilarang.

Jadi peran Dinas Sosial ini lebih kepada membina manusia silver untuk tidak kembali lagi melakukan aktivitas ekonomi di jalanan dan memberikan arahan dan pendampingan agar mereka dapat lebih baik dan bermartabat dalam menghasilkan uang. Selain itu, Dinas Sosial juga membantu memberikan informasi dan arahan kepada para gelandangan dan manusia silver ketika ada lowongan pekerjaan. Apalagi kebanyakan manusia silver biasanya adalah orang-orang yang masih potensial untuk bekerja.

Pendamping sosial di *camp assesment* terdiri dari 13 orang yang mana masing-masing pendamping sosial mendampingi 7-13 orang. Masing-masing pendamping sosial akan membuat catatan sosial berkaitan dengan alasan mengapa manusia silver memilih pekerjaan tersebut hingga rencananya setelah selesai masa *camp assesment*. Pencarian informasi tersebut dilakukan dengan pendekatan individual melalui wawancara. Ketika ada yang dirasa sangat potensial untuk bekerja kembali yang lebih layak, maka akan dilakukan pemanggilan dan konseling secara khusus.

Namun terkadang masih banyak oknum yang jauh lebih memilih menjadi manusia silver dibandingkan bekerja yang lebih layak. Karena kebanyakan mereka selalu membandingkan dahulu pendapatannya ketika menjadi manusia silver dan ketika bekerja, yang mana menurutnya menjadi manusia silver jauh lebih menjanjikan. Hal ini soal mental manusia silver itu sendiri dan juga andilnya orang-orang yang memberikan uang di jalanan yang membuat manusia silver menjadi malas untuk bekerja yang lebih normatif dan bermartabat.

Kantor *camp assesment* ada dua unit yaitu bedrest dan ODGJ. Bagi yang kriterianya pengamen pengemis dan manusia silver kantornya ada di Sewon, Bantul. Adapun daya huni hingga sampe 200 orang, namun kuota penerimaan yang disupport makan, obat dan lainnya saat ini hanya sebanyak 190 orang. Dalam satu tahun biasanya mengassesment 400-500 orang, termasuk manusia silver di dalamnya.

Pembinaan Lanjutan

Setelah program assesment, maka akan ada kegiatan lanjutan di Balai yang jangka waktunya bisa mencapai 1 tahun untuk pembinaan. Untuk gelandangan pengemis dan juga manusia silver ada di BRSBKL (Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras) yang memiliki kegiatan pelatihan professional seperti las kayu dan sebagainya.

Target di *camp assesment* hanya sebatas mengetahui identitas dan plan ke depan dari orang jalanan tersebut. Misalnya A, telah diketahui identitasnya, alamat, dan keluarganya, sudah cukup pembinaannya selama 1-3 bulan dan baru satu kali masuk camp, maka ia bisa dipulangkan ke keluarganya yang mana pihak keluarga harus memberikan jaminan berupa peranannya sebagai keluarga untuk menjaga yang bersangkutan agar tidak kembali ke jalanan. Adapun ketika ada manusia silver yang berkali-kali terkena razia, masuk di *camp assesment*, tidak punya tempat tinggal, tidak jelas identitasnya, maka nantinya ia akan dirujuk ke panti atau balai untuk mendapat keterampilan. Namun kebanyakan manusia silver itu mereka adalah orang yang memiliki tempat tinggal yang hanya mengganti pekerjaannya sehingga menjadi manusia silver.

Upaya Dinas Sosial Yogyakarta dalam menanggulangi fenomena manusia silver menghadapi tantangan dalam pengimplementasian disebabkan oleh beberapa aspek. Pertama dalam aspek hukum atau regulasi yang belum adanya sanksi bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pihak yang memberikan uang di jalanan yang secara signifikan melemahkan efektivitas penegak hukum sehingga fenomena ini terus berlanjut dan sulit diberantas secara tuntas. Oleh karena itu, perlu adanya revisi atau penambahan aturan pelaksanaan yang lebih rinci. Kedua minim sumber daya lembaga sehingga Investasi dalam peningkatan infrastruktur panti dan penambahan jumlah serta kualitas tenaga sosial sangat penting untuk memastikan bahwa program rehabilitasi dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan. Ketiga persepsi masyarakat yang terus memberikan uang di jalanan sehingga melemahkan Upaya penertiban dan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan kampanye edukasi publik yang kuat untuk mengubah perilaku masyarakat agar menyalurkan bantuan melalui saluran resmi, serta pengembangan strategi penertiban yang lebih humanis dan persuasif untuk membangun kepercayaan dan memfasilitasi rehabilitasi yang lebih efektif.

4. KESIMPULAN

Keberadaan manusia silver di Yogyakarta sudah ada sejak sebelum pandemi, namun meningkat drastis saat adanya pandemi. Peningkatan tersebut dilatarbelakangi karena tidak adanya pekerjaan layak bagi mereka untuk dapat menghasilkan uang. Jumlahnya pun tidak diketahui seberapa banyak karena tingginya mobilitas dan susahny melakukan pendataan.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Yogyakarta untuk memperbaiki kesejahteraan manusia silver di Yogyakarta serta dalam menjalankan fungsinya adalah bekerja sama dengan Satpol PP dengan melakukan penertiban bagi manusia silver yang melakukan aksinya di persimpangan lampu merah. Kemudian melakukan assesment pada *camp assesment*. Target dari *camp assesment* ini adalah untuk mengetahui identitas dan pembinaan awal bagi manusia silver. Selanjutnya jika terdapat seorang yang dianggap memiliki progres yang baik, nantinya akan diberikan konseling khusus yang selanjutnya dapat diberikan pembinaan lanjutan untuk mendapatkan keterampilan profesional. Adapun bagi manusia silver yang tidak diketahui identitas dan tempat tinggalnya, maka akan dirujuk ke Dinas Sosial asal kotanya untuk diberi pembinaan.

4. SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif yang lebih komprehensif guna mengestimasi jumlah manusia silver secara lebih akurat di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, studi longitudinal perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektifitas jangka Panjang program rehabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, khususnya dalam mengukur Tingkat keberhasilan reintegrasi sosial dan ekonomi para manusia silver. Di samping itu, kajian mengenai persepsi dan motivasi Masyarakat dalam memberikan uang kepada manusia silver juga penting dilakukan agar memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai factor yang memengaruhi keberlanjutan fenomena ini serta menjadi bahan membuat strategi penanganan yang lebih tepat sasaran. Dengan mempertimbangkan saran ini, diharapkan penelitian yang akan datang mampu memberikan kontribusi ilmiah yang lebih endalam sekaligus mendukung formulasi kebijakan social yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, Robby, Kehidupan Sosial dan Eksploitasi Anak Jalanan “Manusia Silver” di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Darmawan, Tossa Rahmania, Presentasi Diri Pengamen Manusia silver Di kota Bandung (Studi Dramaturgi Mengenai Presentasi Diri dalam Menjalani Kehidupannya di Kota Bandung), Daring, repository UNIKOM, 2013.
- DINSOS-FIX.pdf, dpm-ptsp.surabaya.go.id.
- Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro (Yogyakarta: Kanisius, 2002).
- Hasil wawancara (diolah) dengan Ibu Desi, Pegawai Dinas Sosial DIY pada 8 November 2022.
- Hasil wawancara (diolah) dengan 4 Manusia Silver yang berada di persimpangan lampu merah Janti dan Maguwoharo.
- Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2020, Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020.
- Noor, Munawar, Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume 1, Nomor 2, 2011.
- Rosyadi, Khoirul, Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Jawa Timur pada Masa dan Pasca Pandemi Covid-19: Refleksi Sosiologis, Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan, Volume 1, Nomor 1, 2021.
- Saputra, Agung Bayu, Kontruksi Psikoreligius Manusia Silver di Kota Yogyakarta, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Suharto, Edi, Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan. Jurnal Sosiohumaniora, Volume 17, Nomor 1, 2015.
- Suharto, Edi, Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan. Jurnal Sosiohumaniora, Volume 17, Nomor 1, 2015.
- Tanzeh, Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pkh.kemensos.go.id.

- Rusydi, B. A. (2023). Manusia Silver dan Kebijakan Larangan “Pengemis Jalanan”: Anomali Implementasi Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 di Bantul, Yogyakarta. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 12(1), 59-79.
- Arifin, S. (2023). Solidaritas Komunitas Manusia Silver Dalam Mempertahankan Hidup Dan Ekonomi Keluarga Di Persimpangan Lampu Merah Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang. *ENGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 3(2), 34-48.